



Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK)

Ni Komang Sri Laksmiwati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: komang19001@mail.unpad.ac.id

Ivan Yudianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: ivan.yudianto@unpad.ac.id

Abstract. *Local Government Financial Statements (LKPD) are made as a form of accountability and transparency in the implementation of government activities. From the figures in the LKPD, analyses can be carried out related to the financial condition of the region. The purpose of this study is to provide an overview of the financial condition and financial trends of the Badung Regency Government in 2018-2022 based on the Financial Trend Monitoring System (FTMS) model which consists of 3 dimensions and 15 indicators. This research is a descriptive analysis conducted by descriptive statistical analysis based on secondary data in the form of LHP on LKPD Badung Regency 2018-2022 and interviews to confirm the cause of the decline in the financial trend of an indicator. The results of this study are as many as 11 of the 15 existing indicators experienced a positive (good) trend for 5 (five) years including the Operating Income indicator, PAD per Expenditure Ratio, Government Cash Ratio, Cash and Receivables Ratio, Current Asset Ratio, Short-Term Debt, Long-Term Debt, Revenue per Debt, Financial Balance, Financial Flexibility, and Infrastructure Maintenance. Meanwhile, the other 4 indicators experienced a negative trend (not good) consisting of indicators of Revenue per Personnel Expenditure, Independence Ratio, Intergovernmental Ratio, and Income per Capita.*

Keywords: *Financial Condition, Financial Trend Monitoring System (FTMS), Local Government*

Abstrak. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dari angka-angka yang ada dalam LKPD tersebut dapat dilakukan analisis terkait dengan kondisi keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait kondisi keuangan dan tren keuangan dari Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2018-2022 berdasarkan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) yang terdiri dari 3 dimensi dan 15 indikator. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang dilakukan dengan analisis statistik deskriptif berdasarkan data sekunder berupa LHP atas LKPD Kabupaten Badung tahun 2018-2022 dan wawancara guna mengonfirmasi penyebab penurunan tren keuangan dari suatu indikator. Hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 11 dari 15 indikator yang ada mengalami tren positif (baik) selama 5 (lima) tahun diantaranya indikator Pendapatan Operasional, Rasio PAD per Belanja, Rasio Kas Pemerintah, Rasio Kas dan Piutang, Rasio Aset Lancar, Utang Jangka Pendek, Utang Jangka Panjang, Pendapatan per Utang, Keseimbangan Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur. Sedangkan, untuk 4 indikator lainnya mengalami tren negatif (tidak baik) yang terdiri dari indikator Pendapatan per Belanja Pegawai, Rasio Kemandirian, Rasio Antar Pemerintah, dan Pendapatan per Kapita.

Kata kunci: Kondisi Keuangan, Pemerintah Daerah, Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK)

LATAR BELAKANG

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (PP No 12 Tahun 2019). Keuangan daerah adalah bukti nyata dari kemampuan serta keberhasilan suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada suatu daerah akan berjalan dengan maksimal jika Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk dapat memaksimalkan potensi perekonomian daerah diberikanlah otonomi daerah dengan tujuan untuk memacu kemandirian daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah tersebut mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian serta evaluasi segala sumber daya guna mendorong perekonomian daerah.

Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, Pemerintah Daerah berusaha menyiapkan berbagai program maupun kebijakan dengan dana yang tersedia untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada. Beragamnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari setiap Pemerintah Daerah menyebabkan bervariasinya kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Ritonga, 2013). Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang bervariasi menyebabkan diperlukannya sebuah alat untuk mengukur kondisi keuangan agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi atas kinerjanya serta memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal (Williams, 2003). Selain itu, melakukan analisis kondisi keuangan daerah pada periode tertentu, dapat digunakan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali pada tahun anggaran 2018-2022, pendapatan daerah dari tiap-tiap Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali memperlihatkan peningkatan dan penurunan dari realisasi pendapatan daerah dari setiap tahunnya. Untuk melihat fluktuasi dari realisasi pendapatan daerah pada masing-masing Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Badung	5.420.009.298.379	5.792.967.591.407	3.906.162.801.873	2.708.124.519.192
Kab. Bangli	1.106.097.725.500	1.180.012.548.084	1.012.111.114.390	1.150.283.515.663
Kab. Karangasem	1.482.950.696.123	1.624.330.234.621	1.475.561.872.299	1.555.811.557.854
Kab. Buleleng	2.052.836.000.659	2.288.475.167.042	2.003.219.088.785	2.083.214.717.688
Kab. Gianyar	2.002.646.874.600	2.308.871.426.066	1.884.736.533.888	1.569.948.579.576
Kab. Klungkung	1.100.138.936.499	1.215.589.169.508	1.104.882.392.581	1.146.023.938.454
Kab. Jembrana	1.096.498.631.327	1.144.974.582.851	1.089.673.620.182	1.067.493.613.610
Kab. Tabanan	1.862.277.203.959	1.926.615.982.906	1.789.840.176.484	1.794.178.975.870
Kota Denpasar	2.121.040.458.231	2.193.530.987.449	1.964.054.093.227	1.996.440.641.259

Tabel 2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	<i>Growth 1</i> (2018-2019)	<i>Growth 2</i> (2019-2020)	<i>Growth 3</i> (2020-2021)
Kabupaten Badung	6,88%	-32,57%	-30,67%
Kabupaten Bangli	6,68%	-14,23%	13,65%
Kabupaten Karangasem	9,53%	-9,16%	5,44%
Kabupaten Buleleng	11,48%	-12,46%	3,99%
Kabupaten Gianyar	15,29%	-18,37%	-16,70%
Kabupaten Klungkung	10,49%	-9,11%	3,72%
Kabupaten Jembrana	4,42%	-4,83%	-2,04%
Kabupaten Tabanan	3,45%	-7,10%	0,24%
Kota Denpasar	3,42%	-10,46%	1,65%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2019-2020 (*growth 2*) mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -33%, dimana penurunan penerimaan pendapatan ini paling tinggi jika dibandingkan dengan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten lainnya. Pada tahun 2020-2021, Pemerintah Kabupaten Badung masih tetap mengalami penurunan jumlah realisasi pendapatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten lainnya yakni sebesar -31%.

Tabel 3. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten /Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Badung	4.132.189.417.675	3.593.838.863.728	3.585.992.983.051	2.583.198.673.932
Kab. Bangli	902.456.204.496	951.781.204.550	845.706.694.909	958.622.956.460
Kab. Karangasem	1.302.707.890.909	1.443.066.173.953	1.276.529.554.940	1.356.221.744.047
Kab. Buleleng	1.826.656.534.733	1.998.821.169.885	1.769.754.082.547	1.834.405.957.169
Kab. Gianyar	1.785.987.356.903	1.932.242.328.006	1.883.753.305.511	1.746.869.828.494
Kab. Klungkung	1.032.082.903.830	1.072.197.634.127	952.973.040.576	1.032.346.446.671
Kab. Jembrana	1.083.941.853.650	1.020.508.040.607	938.330.597.600	902.304.129.367
Kab. Tabanan	1.667.272.145.950	1.657.087.300.436	1.542.201.470.206	1.660.309.102.702
Kota Denpasar	1.900.199.898.487	2.055.142.986.563	1.722.827.837.846	1.764.584.002.884

Tabel 4. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	<i>Growth 1</i> (2018-2019)	<i>Growth 2</i> (2019-2020)	<i>Growth 3</i> (2020-2021)
Kabupaten Badung	-13,03%	-0,22%	-27,96%
Kabupaten Bangli	5,47%	-11,14%	13,35%
Kabupaten Karangasem	10,77%	-11,54%	6,24%
Kabupaten Buleleng	9,43%	-11,46%	3,65%
Kabupaten Gianyar	8,19%	-2,51%	-7,27%
Kabupaten Klungkung	3,89%	-11,12%	8,33%
Kabupaten Jembrana	-5,85%	-8,05%	-3,84%
Kabupaten Tabanan	-0,61%	-6,93%	7,66%
Kota Denpasar	8,15%	-16,17%	2,42%

Jika dilihat dari segi realisasi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Badung juga mengalami penurunan yang sangat signifikan pada *growth 3* (2020-2021) yakni sebesar -28%, dimana penurunan tersebut merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kota maupun kabupaten lainnya seperti yang tertera pada tabel diatas.

Fluktuasi dari jumlah realisasi pendapatan dan belanja daerah selama 5 (lima) tahun dari pemerintah Kabupaten Badung membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis serta kajian lebih dalam terkait kondisi keuangan pada Pemerintah Daerah

tersebut untuk mengetahui faktor penyebab penurunan jumlah realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Analisis mengenai kondisi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) yang merupakan pengembangan dari model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS). Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) merupakan model yang dikembangkan oleh Kusnadi dan Ritonga pada tahun 2017 yang dapat digunakan untuk memantau kondisi keuangan Pemerintah Daerah dengan analisis tren dari 15 indikator yang ada.

KAJIAN TEORITIS

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019).

Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan ialah kesanggupan dari suatu organisasi dalam menyelesaikan kewajiban keuangannya dengan tepat waktu. Organisasi yang dapat menyelesaikan kewajiban keuangan yang dimiliki tanpa mengalami kesulitan dapat dianggap berada pada kondisi keuangan yang sehat (Wang et al, 2007). Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas jangka pendek, Solvabilitas jangka

panjang, dan Solvabilitas Layanan), mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

Model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK)

Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) merupakan model yang dikembangkan oleh F. H. Kusnadi dan I. T. Ritonga pada tahun 2017. Pengembangan model ini dilatarbelakangi oleh belum adanya metode baku yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan sektor pemerintah khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa peneliti yang berusaha untuk mengembangkan model analisis kondisi keuangan dari luar negeri untuk disesuaikan dengan kondisi sektor pemerintahan di Indonesia agar model yang digunakan untuk melakukan analisis dapat lebih relevan dengan keadaan pemerintahan di Indonesia.

Pengembangan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) mengacu pada model *Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)* yang dikembangkan oleh *The International City/County Management Association (ICMA)* pada tahun 1980. FTMS merupakan sistem pemberitahuan dini untuk memperkirakan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan cara melakukan analisis tren terhadap beberapa indikator. Ritonga (2014) dalam bukunya menyebutkan bahwa FTMS menggunakan dua faktor dalam mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah yaitu faktor keuangan dan faktor lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif menggunakan data sekunder berupa LHP atas LKPD Kabupaten Badung tahun 2018-2022 dan data primer berupa wawancara dengan Kepala Subbidang Penetapan dan Pembukuan dari BAPENDA Kabupaten Badung.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh LHP atas LKPD Kabupaten Badung, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah LHP atas LKPD Kabupaten Badung pada tahun 2018-2022.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif yakni dengan cara dihitung menggunakan rasio. Hasil yang ditampilkan berupa grafik dan penjelasan naratif atas grafik yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil**

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 yang diolah menggunakan metode SPTK yang terdiri dari 3 dimensi dan 15 indikator.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Perhitungan Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Berdasarkan Model SPTK.

Dimensi	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Basis Pendapatan	Pendapatan per Belanja Pegawai	3,87	3,87	3,10	2,32	3,71	Menurun (Tidak Baik)
	Pendapatan Operasional	1,30	1,47	1,24	1,17	1,60	Meningkat (Baik)
	Rasio Kemandirian	0,84	0,83	0,54	0,65	0,80	Menurun (Tidak Baik)
	Rasio Antar Pemerintah	0,16	0,15	0,22	0,32	0,19	Meningkat (Tidak Baik)
	Rasio PAD per Belanja	0,92	1,04	0,59	0,62	1,15	Meningkat (Baik)
Struktur Utang	Rasio Kas Pemerintah	0,30	2,34	4,79	0,83	6,49	Meningkat (Baik)
	Rasio Kas dan Piutang	1,11	5,80	13,31	4,96	9,94	Meningkat (Baik)
	Rasio Aset Lancar	1,59	8,09	17,26	7,70	10,36	Meningkat (Baik)
	Utang Jangka Pendek	7,38	48,66	60,73	20,43	27,30	Meningkat (Baik)
	Utang Jangka Panjang	18,44	112,71	272,68	128,61	105,34	Meningkat (Baik)
	Pendapatan per Utang	7,18	47,44	58,43	19,23	25,81	Meningkat (Baik)
	Keseimbangan Keuangan	5,32	35,17	39,59	12,13	18,85	Meningkat (Baik)
Fleksibilitas Tingkat Layanan	Pendapatan per Kapita	8.176.209	8.532.873	7.125.433	4.930.137	8.388.893	Menurun (Tidak Baik)

Dimensi	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
	Fleksibilitas Keuangan	0,25	0,34	0,23	0,20	0,41	Meningkat (Baik)
	Pemeliharaan Infrastruktur	0,82	0,82	0,84	0,77	0,84	Menurun (Baik)

Sumber: Data diolah menggunakan model SPTK, 2023

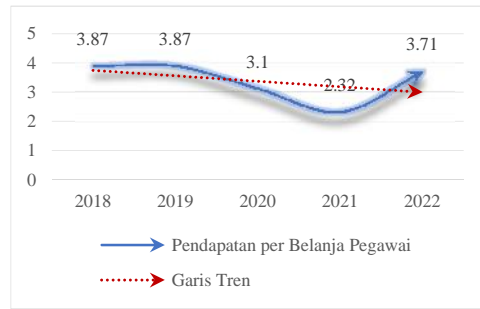
Tabel 6. Tabel Pertumbuhan Kondisi Keuangan Berdasarkan Model SPTK

Dimensi	Indikator	Growth 1 (2018-2019)	Growth 2 (2019-2020)	Growth 3 (2020-2021)	Growth 4 (2021-2022)
Basis Pendapatan	Pendapatan per Belanja Pegawai	-0,15%	-19,79%	-25,34%	60,11%
	Pendapatan Operasional	13,31%	-15,60%	-5,66%	36,18%
	Rasio Kemandirian	-0,70%	-35,07%	19,26%	24,38%
	Rasio Antar Pemerintah	-3,11%	46,02%	42,94%	-39,11%
	Rasio PAD per Belanja	13,01%	-43,06%	5,49%	84,44%
Struktur Utang	Rasio Kas Pemerintah	677,14%	104,62%	-82,61%	678,38%
	Rasio Kas dan Piutang	422,36%	129,64%	-62,77%	100,58%
	Rasio Aset Lancar	409,69%	113,28%	-55,41%	34,62%
	Utang Jangka Pendek	559,66%	24,80%	-66,35%	33,60%
	Utang Jangka Panjang	511,30%	141,93%	-52,83%	-18,10%
	Pendapatan per Utang	561,04%	23,18%	-67,10%	34,23%
	Keseimbangan Keuangan	560,70%	12,58%	-69,36%	55,34%
Fleksibilitas Tingkat Layanan	Pendapatan per Kapita	4,36%	-16,49%	-30,81%	70,16%
	Fleksibilitas Keuangan	34,19%	-33,02%	-12,42%	105,60%
	Pemeliharaan Infrastruktur	0,65%	2,55%	-8,32%	9,41%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis kondisi keuangan di Pemerintah Kabupaten Badung dengan menggunakan model SPTK diatas, dapat diketahui bahwa dari 15 indikator yang diteliti, terdapat sebanyak 11 indikator dari kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang menunjukkan tren kondisi keuangan yang sudah baik. Namun, terdapat 4 indikator lainnya yang masih menunjukkan tren kondisi keuangan yang tidak baik. Berikut merupakan penjelasan dari keempat indikator tersebut.

Indikator Pendapatan per Belanja Pegawai



Grafik 1. Indikator Pendapatan per Belanja Pegawai tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 1, dapat diketahui bahwa indikator Pendapatan per Belanja Pegawai dari Pemerintah Kabupaten Badung selama lima tahun cenderung mengalami tren penurunan. Dimana berdasarkan model SPTK, penurunan dari indikator Pendapatan per Belanja Pegawai menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam memenuhi Belanja Pegawai semakin menurun.

Pada *growth 1* (2018-2019) terjadi penurunan sebesar -0,15%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 372.958.293.028,03 (7%), dan meningkatnya realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2019 sebesar Rp 98.891.185.980,51 (7%). Dimana peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah disebabkan oleh meningkatnya realisasi PAD khususnya Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, meningkatnya realisasi Dana Perimbangan, serta meningkatnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya Pendapatan Hibah, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sementara itu, peningkatan realisasi Belanja Pegawai disebabkan oleh meningkatnya Belanja Gaji dan Tunjangan, dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

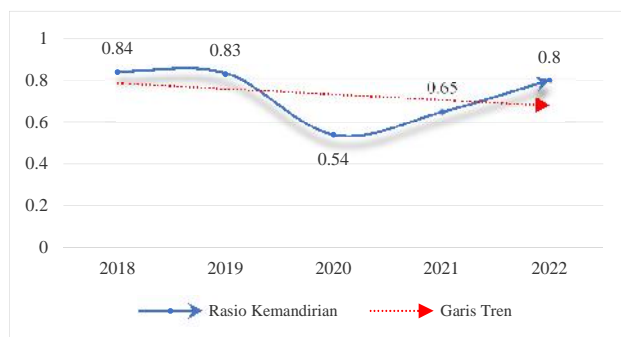
Pada *growth 2* (2019-2020) kembali terjadi penurunan sebesar -19,79%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya realisasi Total Pendapatan tahun 2020 yang sangat signifikan yakni sebesar -Rp 1.886.804.789.533,77 (-33%), dan penurunan pada realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2020 sebesar -Rp 248.723.170.053,05 (-17%). Dimana penurunan Total Pendapatan ini disebabkan oleh menurunnya realisasi PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sementara itu, penurunan realisasi Belanja Pegawai disebabkan oleh

menurunnya Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Penerimaan Lainnya dan anggota DPRD serta KDH/WKDH.

Pada *growth 3* (2020-2021) terjadi penurunan sebesar -25,34%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar -Rp 1.198.038.282.680,83 (-31%), dan penurunan pada realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021 sebesar -Rp 111.462.982.059,40 (-9%). Dimana penurunan pada realisasi Total Pendapatan Daerah disebabkan oleh terjadinya penurunan pada PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain penurunan PAD, disebabkan pula oleh menurunnya jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri atas penurunan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Sanksi Administrasi, dan Penerimaan Lainnya. Sementara itu, penurunan realisasi Belanja Pegawai disebabkan oleh Belanja Gaji dan Tunjangan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, dimana penurunan belanja pegawai ini dilakukan karena rasionalisasi anggaran pada tahun 2021 terkait dengan dampak dari Covid-19.

Pada *growth 4* (2021-2022) terjadi peningkatan sebesar 60,11%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.901.572.576.947,17 (70%), dan penurunan pada realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp 74.959.242.087,65 (7%). Dimana peningkatan pada Total Pendapatan Daerah utamanya disebabkan oleh meningkatnya PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, penurunan realisasi Belanja Pegawai disebabkan oleh menurunnya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Pegawai BLUD RSUD.

Indikator Rasio Kemandirian



Grafik 2. Indikator Rasio Kemandirian tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 2, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian dari Pemerintah Kabupaten Badung selama lima tahun mengalami tren penurunan. Dimana berdasarkan model SPTK, hal tersebut mengindikasikan kemandirian keuangan pemerintah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun.

Pada *growth 1* (2018-2019) terjadi penurunan sebesar -0,70%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 279.472.052.743,52 (6%) yang terdiri atas peningkatan pada Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, disebabkan pula oleh meningkatnya realisasi Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 372.958.293.028,03 (7%). Dimana peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah disebabkan oleh meningkatnya realisasi PAD khususnya Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, meningkatnya realisasi Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum, serta meningkatnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

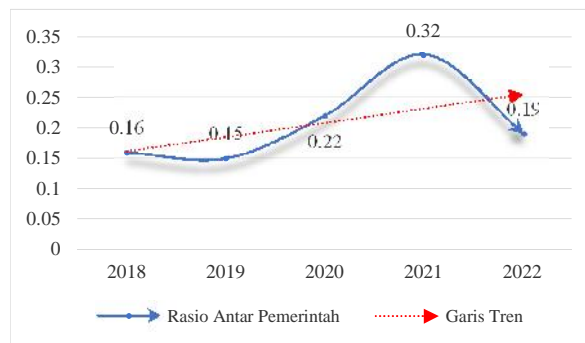
Pada *growth 2* (2019-2020) terjadi penurunan sebesar -35,07% yang disebabkan oleh menurunnya realisasi PAD dengan sangat signifikan, yakni mencapai -Rp 2.718.208.819.814,92 (-56%) yang diakibatkan oleh penurunan yang sangat signifikan pada realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selain itu, disebabkan pula oleh menurunnya realisasi Total Pendapatan tahun 2020 yang sangat signifikan yakni sebesar -Rp 1.886.804.789.533,77 (-33%). Dimana penurunan realisasi Total Pendapatan disebabkan oleh penurunan realisasi PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada *growth 3* (2020-2021) terjadi peningkatan sebesar 19,26% yang disebabkan oleh penurunan pada realisasi PAD sebesar -Rp 366.634.414.174,20 (-17%) khususnya Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Selain itu, disebabkan pula oleh penurunan realisasi Total Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar -Rp 1.198.038.282.680,83 (-31%) yang disebabkan oleh terjadinya penurunan pada PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain penurunan PAD, menurunnya Total Pendapatan Daerah tahun 2021 juga disebabkan oleh menurunnya jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri atas penurunan dari Hasil Penjualan Aset

Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda Sanksi Administrasi, dan Penerimaan Lainnya.

Pada *growth* 4 (2021-2022) kembali terjadi peningkatan sebesar 24,38% karena realisasi PAD pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar Rp 1.955.400.221.270,43 (112%) yang disebabkan oleh peningkatan pada realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selain itu, disebabkan pula karena peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.901.572.576.947,17 (70%). Dimana peningkatan pada Total Pendapatan Daerah utamanya disebabkan oleh meningkatnya PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Indikator Rasio Antar Pemerintah



Grafik 3. Indikator Rasio Antar Pemerintah tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa indikator Rasio Antar Pemerintah dari Pemerintah Kabupaten Badung selama lima tahun cenderung mengalami tren peningkatan. Dimana berdasarkan model SPTK hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kebergantungan dari Pemerintah Kabupaten Badung kepada sumber dana dari pihak eksternal cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya.

Pada *growth* 1 (2018-2019) terjadi penurunan sebesar -3,11% disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Transfer pada tahun 2019 sebesar Rp 30.483.120.284,51 (4%) dan meningkatnya realisasi Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 372.958.293.028,03 (7%). Dimana peningkatan pada Pendapatan Transfer disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu DAU, meningkatnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana Penyesuaian, serta

meningkatnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Sementara itu, peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah disebabkan oleh meningkatnya realisasi PAD khususnya Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, meningkatnya realisasi Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum, serta meningkatnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

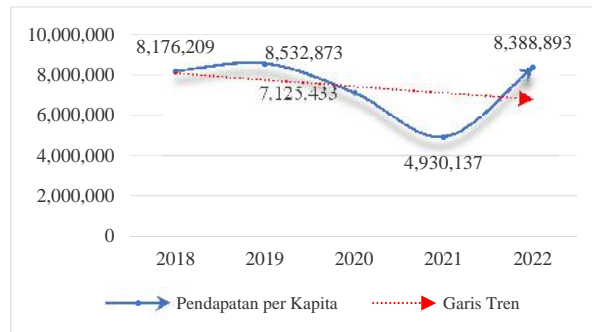
Pada *growth* 2 (2019-2020) terjadi peningkatan sebesar 46,02%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Transfer pada tahun 2020 sebesar -Rp 13.681.400.718,85 (-2%) dan menurunnya realisasi Total Pendapatan tahun 2020 yang sangat signifikan yakni sebesar -Rp 1.886.804.789.533,77 (-33%). Dimana penurunan pada Pendapatan Transfer disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu DAU, serta menurunnya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Sementara itu, penurunan Total Pendapatan ini disebabkan oleh realisasi PAD yang menurun dengan sangat signifikan yakni sebesar -Rp 2.718.208.819.814,92 (-56%) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada *growth* 3 (2020-2021) terjadi peningkatan sebesar 42,94%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi penurunan pada Pendapatan Transfer sebesar -Rp 7.877.573.696,66 (-1%) dan penurunan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar -Rp 1.198.038.282.680,83 (-31%). Dimana penurunan pada Pendapatan Transfer disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, DAU, dan DAK, menurunnya Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak, serta menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana Penyesuaian. Sementara itu, penurunan pada realisasi Total Pendapatan Daerah disebabkan oleh terjadinya penurunan pada PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain penurunan PAD, disebabkan pula oleh menurunnya realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri atas penurunan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi

Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda Sanksi Administrasi, dan Penerimaan Lainnya.

Pada *growth* 4 (2021-2022) terjadi penurunan sebesar -39,11%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 terjadi peningkatan Pendapatan Transfer sebesar Rp 31.532.881.628,77 (4%) dan peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.901.572.576.947,17 (70%). Dimana peningkatan pada Pendapatan Transfer disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan, dan meningkatnya Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Bantuan Keuangan. Sementara itu, peningkatan pada Total Pendapatan Daerah utamanya disebabkan oleh meningkatnya PAD sebesar Rp 1.955.409.221.270,43 (112%) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Indikator Pendapatan per Kapita



Grafik 4. Indikator Pendapatan per Kapita tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 4 dapat diketahui bahwa indikator Pendapatan per Kapita dari Pemerintah Kabupaten Badung selama lima tahun cenderung mengalami tren penurunan, dimana hal tersebut berdasarkan model SPTK menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan layanan kepada masyarakat cenderung mengalami penurunan.

Pada *growth* 1 (2018-2019) terjadi peningkatan sebesar 4,36% yang disebabkan oleh meningkatnya realisasi Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 372.958.293.028,03 (7%). Peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah disebabkan oleh meningkatnya realisasi PAD khususnya Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, meningkatnya realisasi Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum, serta meningkatnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pada *growth 2* (2019-2020) terjadi penurunan sebesar -16,49%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya realisasi Total Pendapatan tahun 2020 yang sangat signifikan yakni sebesar -Rp 1.886.804.789.533,77 (-33%). Dimana penurunan realisasi Total Pendapatan disebabkan oleh realisasi PAD yang menurun dengan sangat signifikan yakni sebesar -Rp 2.718.208.819.814,92 (-56%) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada *growth 3* (2020-2021) terjadi penurunan sebesar -30,81%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar -Rp 1.198.038.282.680,83 (-31%) yang disebabkan oleh terjadinya penurunan pada PAD sebesar -Rp 366.634.414.174,20 (-17%) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain penurunan PAD, disebabkan pula oleh menurunnya jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri atas penurunan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda Sanksi Administrasi, dan Penerimaan Lainnya.

Pada *growth 4* (2021-2022) kembali terjadi peningkatan sebesar 70,16%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.901.572.576.947,17 (70%) yang disebabkan oleh meningkatnya PAD sebesar Rp 1.955.409.221.270,43 (112%) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat empat indikator yang mengalami tren penurunan (tidak baik), yaitu Indikator Pendapatan per Belanja Pegawai, Rasio Kemandirian, Rasio Antar Pemerintah, dan Pendapatan per Kapita. Setelah dilakukan analisis secara lebih mendalam, diketahui bahwa penyebab utama penurunan dari keempat tren tersebut adalah terjadinya penurunan yang sangat signifikan dari realisasi Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 dan 2021.

Realisasi PAD yang menurun pada tahun 2020 utamanya disebabkan oleh penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar -Rp 2.603.563.140.925,08 (-61,74%) akibat berkurangnya penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penurunan pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar -Rp 82.986.795.911,28 (-56,05%) yang diakibatkan oleh berkurangnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Selain itu, terjadi penurunan pada Lain-lain PAD Yang Sah sebesar -Rp 42.849.666.567,76 (-18,01%) yang disebabkan oleh menurunnya Hasil Penjualan Aset Lainnya, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Pendapatan Denda Sanksi Administrasi, dan Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.

Sementara itu, realisasi PAD yang menurun pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya jumlah penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar -Rp 335.036.456.559,13 (-20,76%) yang disebabkan oleh penurunan pada jumlah penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah. Penurunan jumlah realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar -Rp 23.085.138.052,10 (-35,48%) yang disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Penurunan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar -Rp 36.410.239.760,31 (-14,98%) yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Selain itu, terdapat beberapa sebab-sebab menurunnya realisasi PAD pada tahun 2020 dan 2021 (CaLK Pemkab Badung tahun 2020 dan 2021):

- Terjadinya bencana non alam yaitu Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan manusia, khususnya perekonomian dan sektor pariwisata yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Badung.
- Pemberlakuan kebijakan bebas biaya listrik untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan diskon biaya sebesar 50% bagi pelanggan listrik berdaya 900 VA. Selain itu, penjualan tenaga listrik mengalami penurunan dikarenakan turunnya aktivitas hotel, restoran, hiburan dan perumahan sebagai akibat Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan turunnya pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
- Penutupan usaha secara permanen dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel sebanyak 105 hotel, Restoran sebanyak 188 restoran, Hiburan sebanyak 39 hiburan, Parkir sebanyak 3 lahan parkir, Air Tanah sebanyak 15 unit, serta Mineral Bukan Logam dan Batuan sebanyak 1 unit, dengan total tutup permanen sebanyak 351 Wajib Pajak Daerah. Sedangkan untuk penutupan usaha sementara selama masa pandemi terdiri dari 609 hotel, 364 restoran, 128 hiburan, dan 4 parkir, dengan total sebanyak 1.105 Wajib Pajak.
- Menurunnya jumlah transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan akibat dari turunnya daya beli masyarakat khususnya di bidang properti.
- Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan dari Wajib Pajak dikarenakan kondisi Pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada CaLK Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2021 (25-26), kondisi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19 tentu akan berimbas pada tingkat daya beli masyarakat dunia, sehingga berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Badung yang akan berpengaruh terhadap PAD utamanya pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan kebijakan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, sebagai berikut:

- a. Memperluas serta mengintensifkan pemungutan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan.
- b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Mengoptimalkan peran perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber PAD.
- d. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas.
- e. Mendayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- f. Pembangunan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
- g. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektifitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) dari Pemerintah Kabupaten Badung selama lima tahun yaitu tahun 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa tren kondisi keuangan dari Pemerintah Kabupaten Badung selama lima tahun tersebut cenderung tergolong baik atau menunjukkan tren positif. Dari total keseluruhan 15 rasio yang ada, sebanyak 11 indikator mengalami tren positif (baik) sedangkan 4 indikator lainnya mengalami tren negatif (tidak baik).

Adapun ke-11 indikator yang menunjukkan tren positif adalah indikator Pendapatan Operasional, Rasio PAD per Belanja, Rasio Kas Pemerintah, Rasio Kas dan Piutang, Rasio Aset Lancar, Utang Jangka Pendek, Utang Jangka Panjang, Pendapatan per Utang, Keseimbangan Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur. Sementara itu, untuk 4 indikator yang menunjukkan tren negatif adalah indikator Pendapatan per Belanja Pegawai, Rasio Kemandirian, Rasio Antar Pemerintah, dan Pendapatan per Kapita.

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa penyebab dari penurunan realisasi total pendapatan dan belanja daerah tersebut tidak luput dari adanya bencana non-alam (*force majeure*) yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan berdampak pada seluruh sektor kehidupan terlebih pada sektor ekonomi.

Namun, Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai upaya untuk kembali meningkatkan realisasi pendapatan daerah seiring dengan kembali pulihnya berbagai kegiatan setelah status kegawatdaruratan global untuk Pandemi Covid-19 ini dinyatakan selesai oleh *World Health Organization* (WHO) pada bulan Mei 2023.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung adalah dengan menetapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna kembali meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Adapun bentuk perwujudan dari kebijakan intensifikasi yaitu dari segi aspek kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta aspek personalia yakni meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, upaya ekstensifikasi dilakukan dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan dibidang investasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Artikel ini terutama kepada Bapak Dr. Ivan Yudianto, S.E., Ak., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, serta bimbingan hingga artikel ini dapat diselesaikan. Tidak lupa, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Tettet Fitrijanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2018.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022.
- Jubaedah, E. (2019). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 8(3), 04. <https://doi.org/10.31113/jia.v8i3.291>. Diakses pada: 23 April 2023, dari: <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/291>.
- Kusnadhi, F. H. (2017). Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1). Diakses pada 1 April 2023, dari: <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59310/28960>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses pada tanggal 15 April 2023, dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Diakses pada, 19 Mei 2023, dari: <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>.